

## BAB II

### DINAMIKA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PRAKTIK *COMFORT WOMEN*

Bab ini diawali dengan membahas mengenai praktik *comfort women* dan penyelesaian masalah ini dengan kesepakatan 2015. Praktik *comfort women* telah menimbulkan banyak korban dan merupakan bentuk kejahatan perang. Terkait dengan permasalahan ini Pemerintah Jepang telah beberapa kali menyatakan permintaan maafnya namun tidak ditanggapi dengan baik. Permasalahan ini menemui titik terang pada 2015 dengan adanya kesepakatan yang dianggap sebagai kesepakatan yang '*Final and Irreversible*'. Terdapat 5 poin kesepakatan serta syarat untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*.

Selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang sejak sebelum Perang Dunia sampai pada saat dilaksanakannya Kesepakatan 2015. Kemudian menjelaskan mengenai dinamika politik di Asia Timur dan bagaimana hal tersebut juga mempengaruhi hubungan Korea Selatan-Jepang. Asia Timur terdiri dari beberapa negara yaitu Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Selain negara-negara tersebut, terdapat Amerika Serikat yang memiliki peran penting dalam regional Asia Timur. Hubungan yang terjalin antarnegara juga saling mempengaruhi kebijakan masing-masing negara. Dinamika hubungan antara Korea Selatan-Jepang pun dipengaruhi oleh negara lain seperti Korea Utara, Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Korea Selatan dan Jepang merupakan sekutu Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dan Tiongkok merupakan musuh bersama bagi aliansi ini.

## 2.1 Sejarah Comfort Women di Korea Selatan

*Comfort women* adalah budak seks tentara – tentara Jepang selama Perang Dunia ke 2 berlangsung (awf.or.jp, 2000). Mayoritas berasal dari Jepang, Korea dan Tiongkok. Tetapi tidak sedikit dari para *comfort women* yang berasal dari negara jajahan Jepang lain seperti: Indonesia, Filipina, dan Malaysia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013). Sistem *comfort women* muncul setelah terjadi peristiwa *Rape of Nanking* atau *Shanghai Incident*. Sistem tersebut dimulai pada tahun 1931 saat Jepang menginvasi Manchuria dan berkembang ke wilayah Tiongkok (Kuki, 2013). Saat itu tentara-tentara Jepang memperkosa ratusan perempuan Tiongkok. Menurut sebuah laporan yang disiapkan pada akhir tahun 1938 oleh kantor Konsulat Jenderal Jepang di Shanghai, “segera setelah Insiden Shanghai terjadi, beberapa staf dari pasukan militer kami yang ditempatkan di sini mendirikan *navy ianjo* (rumah-rumah bordil berlisensi) untuk dijadikan sebagai fasilitas hiburan untuk para anggotanya yang terus dioperasikan sejak saat itu (Tanaka, 2002).” Tujuan rumah bordil ini adalah memperbaiki reputasi Jepang akibat dari *Shanghai Incident*, sebagai metode pencegahan VD (*venereal disease*), mencegah tentara melakukan pemerkosaan terhadap perempuan – perempuan lokal dan dioperasikan di bawah pengawasan ketat otoritas angkatan laut serta kantor Konsulat Jenderal.

**Gambar 2.1 Comfort women bersama tentara Jepang**



Sumber: The US National Archives

Pada masa Perang Dunia banyak perempuan yang secara paksa diculik dan bahkan dalam beberapa kasus tentara Jepang atau anggota perekrutan akan membunuh anggota keluarga yang menolak memberikan anak perempuannya (Argibay, 2003). Setelah itu para perempuan – perempuan tersebut dibawa ke rumah bordil yang disebut dengan *comfort station* atau *ianjo* yang berada di kamp-kamp tentara di berbagai negara jajahan Jepang. Menurut pengakuan mantan *comfort women*, Kimiko Kaneda, dalam sehari setidaknya dia dan perempuan lain harus mau melayani 20 tentara (awf.or.jp). Menurut penuturannya, jika mereka menolak melayani maka tentara – tentara itu akan memaksa, memukulinya, dan melakukan kekerasan lainnya. Hah Sang Suk, korban *comfort women* lainnya mengatakan jika perempuan yang menjadi *comfort women* diberi pakaian dan alat rias oleh pemilik rumah bordil tetapi tidak diberi uang (awf.or.jp).

**Gambar 2.2 Comfort Station yang berada di Shanghai, Tiongkok**



Sumber: <https://apjff.org/data/comfortstn.shangha.jpg>

Praktik *comfort women* menyebabkan banyak korban dan meninggalkan trauma bagi korban yang selamat. *Comfort women* paling banyak berasal dari Korea. Diperkirakan ada sebanyak 200.000 perempuan Korea yang menjadi korban (United Nation Commission On Human Rights, 1996). Tidak dapat dipastikan berapa jumlah perempuan yang menjadi korban. Pemerintah dan tentara Jepang membakar banyak dokumen penting tepat setelah kekalahan karena takut akan penuntutan kejahatan perang (Yoshimi, 2000). Pengadilan Global PBB tentang Pelanggaran Hak Asasi Perempuan pada Konferensi Dunia PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993 memperkirakan kurang dari 10 persen *comfort women* selamat di akhir Perang Dunia (Levy & Sidel, 2000). Praktik *comfort women* yang dilakukan Jepang merupakan tindakan yang telah melanggar HAM dan juga merupakan suatu bentuk kejahatan perang. Tentu saja, permasalahan ini adalah permasalahan yang penting dan harus diselesaikan.

Dimulai sejak awal tahun 1992 para aktivis dan mantan *comfort women* mengadakan *Wednesday Demonstration*. Demonstrasi ini selalu diadakan

setiap hari rabu sampai dengan saat ini di depan kantor Kedutaan Besar Jepang. Demonstrasi ini diinisiasi oleh *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery*. Terdapat slogan yang selalu diteriakkan oleh para demonstran dalam *Wednesday Demonstration*. Slogan tersebut adalah "Akui kejahatan perang mu," "Ungkapkan kebenaran," "Buat permintaan maaf resmi.," "Berikan kompensasi hukum," "Menghukum penjahat perang," "Catat fakta sejarah dan berikan pendidikan tentang hal itu," "Membangun monumen perdamaian dan museum sejarah."

### Gambar 2.3 Wednesday Demonstration di Depan Kantor Kedutaan Jepang pada tahun 2014



Sumber: BBC

Para aktifis tidak hanya melakukan demonstrasi tetapi juga membangun sebuah patung *Pyeonghwai sonyeosang* yang menggambarkan seorang *comfort women*. *Pyeonghwai sonyeosang* atau *Statue of Peace* berbentuk seorang anak perempuan yang menghadap ke arah Kantor Kedutaan Besar Jepang menggunakan *hanbok*<sup>1</sup> dan duduk di sebuah kursi dengan tangan mengepal dan seekor burung berada di pundaknya. Bayangan yang tergantung di tanah di bawah patung membentuk bentuk seorang wanita tua. Seekor

<sup>1</sup> Hanbok adalah pakaian tradisional Korea Selatan

burung yang duduk di bahu kiri gadis itu mewakili kebebasan dan kedamaian serta merupakan jembatan spiritual yang menghubungkan para wanita yang telah meninggal dengan mereka yang masih hidup. Seekor kupu-kupu diposisikan di dada bayangan melambangkan kelahiran kembali. Kursi kosong di sebelah kanan gadis itu adalah sumbangan dari warga untuk memberikan kenyamanan kepada para penyintas (Park H. J., 2011).

Patung itu pertama kali dibangun dan diresmikan pada demonstrasi mingguan ke-1.000 di depan Kedutaan Besar Jepang tahun 2011. Kim Seo Kyung dan Kim Eun Sung adalah dua orang seniman yang membuat patung tersebut. Pada awalnya kedua seniman ini dan para aktivis hanya ingin membuat sebuah monumen kecil untuk memperingati demonstrasi mingguan ke-1.000. Namun, Pemerintah Jepang menolak pembangunan monumen ini. Kim Seo Kyung menjelaskan "Tapi kami mendengar bahwa pemerintah Jepang menentang batu peringatan yang sedang dibangun, dan ini menyinggung kami sebagai seniman, Jika pemerintah Jepang tidak bereaksi terlalu berlebihan, itu mungkin hanya batu peringatan kecil (Sol & Griffiths, 2017)."

Pembangunan *Statue of Peace* tentu saja mendapatkan kecaman dari pihak Pemerintah Jepang. Associated Press melaporkan bahwa Sekretaris kabinet Jepang, Osamu Fujimura, menyebut pembangunan patung itu "sangat disesalkan" (BBC, 2011). Pembangunan ini menyebabkan Jepang menghentikan pembicaraan mengenai pertukaran mata uang yang telah direncanakan dan menunda dialog ekonomi tingkat tinggi. Terkait protes dari

Jepang, pejabat Korea Selatan menyatakan jika mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap patung tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Cho Byung Jae mengatakan bahwa “Kami telah menyampaikan kekhawatiran Jepang kepada dewan. Namun, mantan korban 'wanita penghibur' meninggal bahkan sampai hari ini, hanya menyisakan 63 orang yang selamat. Dalam situasi ini, kami di Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberi tahu para korban untuk mengubah atau membatalkan rencana untuk mendirikan monumen (The Japan Times, 2011), ”. Hingga saat ini patung tersebut tetap berdiri kokoh di depan kantor kedutaan.

**Gambar 2.4 Statue of Peace yang berada di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan**



Sumber: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Sub bab 2.1 telah menjelaskan mengenai sejarah dimulainya praktik *comfort women* serta usaha dari para korban dan aktifis untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Jepang. Dilihat dari sejarahnya dapat disimpulkan jika praktik ini merupakan kegiatan yang telah melanggar HAM dan telah menimbulkan banyak korban. Korban dan aktifis juga terus mendesak Jepang untuk meminta maaf dan menginginkan pemerintah Korea Selatan segera

menyelesaikan permasalahan ini. Maka, pada bab selanjutnya penulis membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang untuk menyelesaikan permasalahan terkait *comfort women*.

## **2.2 Dinamika Penyelesaian Isu *Comfort Women***

Pemerintah Jepang awalnya menyangkal dan menolak untuk meminta maaf karena menganggap semua permasalahan perang serta kompensasi telah diselesaikan pada San Francisco Peace Treaty pada 1951 dan Perjanjian Damai Korea Selatan – Jepang tahun 1965 (Soh, 2001). Sejak 1991 akhirnya Pemerintah Jepang mulai mengutarakan permintaan maaf, namun sering kali ditolak dan tidak dianggap sebagai permintaan resmi oleh Korea Selatan. Terkait dengan keterlibatannya, Pemerintah tetap menyatakan jika rumah bordil atau *comfort station* yang ada tidak dijalankan oleh pihak pemerintah ataupun militer tetapi oleh pihak swasta. Pada 1993 Ketua Sekretaris Kabinet, Yohei Kono, menyatakan permintaan maaf yang terkenal dengan sebutan “*Kono Statement*”. Kono mengatakan jika Jepang mengakui keberadaan *comfort women* pada Perang Dunia II dan mengakui jika militer Jepang terlibat dalam praktik tersebut (Japan-U.S. Feminist Network for Decolonization ). Pemerintah Korea Selatan menyambut baik permintaan maaf ini karena akhirnya Jepang mengakui keterlibatan militer dan adanya pemaksaan dan kekerasan. Akan tetapi pernyataan ini tetap menuai kritik karena Korea Selatan merasa Jepang tetap belum bertanggung jawab sebagai pelaku yang harus memberikan kompensasi dan mendapatkan hukuman.



Korea Selatan juga telah membawa permasalahan ini ke PBB. UNHCR kemudian mengeluarkan laporan yang berisi enam hal yang harus dilakukan Jepang untuk menyelesaikan isu ini. Namun, pemerintah Jepang menolak tanggung jawab hukumnya. Pada Juni 1998, *special reporter* PBB American Gay J. McDougall mempresentasikan laporan terakhirnya di UNHCR dan menyimpulkan bahwa Tentara Jepang telah melanggar larangan terhadap perbudakan dan kejahatan perang dan bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Jonsson, 2015). UNHCR merekomendasikan bahwa pemerintah Jepang harus menghukum yang bertanggung jawab dan membayar kompensasi kepada para korban.

Jepang juga telah mendirikan *The Asian's Women Fund* atau AWF, sebuah lembaga non-pemerintah yang bertujuan membagikan dan memberikan secara merata kompensasi bagi korban *comfort women*. Lembaga ini memberikan setidaknya dua juta yen untuk setiap korban yang melapor dan terdaftar ([awf.or.jp](http://awf.or.jp)). Media dan juga masyarakat mengkritik lembaga tersebut karena dana yang diberikan mayoritas berasal dari perusahaan swasta ataupun organisasi masyarakat dan bukan dari pemerintah. Korea Selatan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap lembaga ini, “Kami sangat tidak senang bahwa pemerintah Jepang tidak dapat menghargai keseriusan masalah ini dan, bertentangan dengan tuntutan kami sebagai pemerintah Republik Korea dan orang-orang dari banyak korban, mengeluarkan pembayaran sementara (Cho, 2015) ”. Para *comfort women* juga menolak uang bantuan karena mereka menginginkan penyelidikan masalah dan pengakuan atas kehormatan serta martabat mereka.

Pada KTT Jepang-Korea Selatan 2011, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea menyarankan untuk kembali melakukan perundingan terkait penyelesaian isu *comfort women* dengan perjanjian. Pemerintah Jepang menolak dan menegaskan apabila semua permasalahan telah diselesaikan pada Perjanjian Normalisasi 1965. Jepang mengusulkan untuk memberi paket bantuan kepada para korban beserta surat permintaan maaf dari PM Jepang dan permintaan maaf langsung oleh duta besar Jepang untuk Korea. Tetapi dengan syarat Korea Selatan membongkar *statue of peace* yang ada di depan Kedutaan Besar Jepang. Presiden Lee Myung Bak menolak untuk membongkar patung tersebut dan akhirnya kesepakatan pun gagal terbentuk.

Pada bulan Februari 2014, Wakil Menteri Kabinet di bawah Kono pada saat pernyataan itu dirilis menyatakan kepada parlemen bahwa pemerintah pada saat itu tidak memverifikasi kesaksian wanita penghibur yang disurvei oleh pemerintah Korea Selatan, dan "mungkin" pemerintah Korea Selatan terlibat dalam penyusunan pernyataan itu (Japan-U.S. Feminist Network for Decolonization ). Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe kemudian meminta untuk menginvestigasi ulang "*Kono Statement*". Rencana pemerintah Jepang tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara Asia lainnya tidak hanya Korea Selatan. Akibat dari rencana Abe yang ingin merevisi "*Kono Statement*", Pak Geun Hye menolak untuk bertemu dengan Abe. Bahkan, dalam KTT Korea Selatan-Jepang-Tiongkok di Seoul, Park mengecualikan Abe dari perjamuan negara dengan para pemimpin Tiongkok. Selama delapan bulan setelah menjabat sebagai presiden, Park Geun Hye menolak bertemu

dengan Shinzo Abe. Hubungan kedua negara pada masa ini dapat dikatakan kritis.

Park Geun Hye berkata "Dan tidak ada dari kasus-kasus ini (*comfort women*) yang diselesaikan atau ditangani; Jepang tidak mengubah posisi mereka sehubungan dengan hal ini. Jika Jepang terus berpegang pada persepsi historis yang sama dan mengulangi komentar masa lalu, lalu apa tujuan diadakannya pertemuan? Mungkin lebih baik tidak melakukannya (Williamson, 2013)." Sentimen anti-Jepang terus berkembang selama masa kepemimpinan Park Geun Hye. Bisa disimpulkan jika Park Geun Hye menganggap pertemuan dengan Jepang terkait permasalahan apapun tidak ada gunanya selama Jepang tidak mengakui kesalahannya.

Setelah bertahun-tahun tidak terselesaikan dan hanya memberikan permintaan maaf dan pernyataan, akhirnya Shinzo Abe dan Park Geun Hye bertemu secara resmi melalui panggilan telepon selama kurang lebih 15 menit untuk membicarakan tentang penyelesaian permasalahan *comfort women*. Baik Park dan Abe sangat ingin membuat perjanjian pada tahun 2015 bersamaan dengan peringatan 50 tahun perjanjian yang menormalkan hubungan antara kedua negara mereka dan peringatan ke-70 berakhirnya perang (Choe S. , 2015). Dalam pertemuan ini Perdana Menteri Abe menyampaikan lagi permintaan maafnya yang paling tulus dan penyesalannya kepada semua wanita yang menjalani pengalaman yang tak terukur dan menyakitkan serta menderita luka fisik dan psikologis yang tak dapat disembuhkan sebagai *comfort women* (The Government of Japan, 2015).

Dialog yang terjadi pada 2015 ini diharapkan menjadi akhir dari permasalahan dan tidak lagi dapat diubah jika sudah ditandatangani. Untuk itu kesepakatan ini disebut dengan *Finally and Irreversibly Agreement*. Kesepakatan ini ditandatangani pada 28 Desember 2015 dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang.

Dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa : (i) Jepang akan memberikan dana sebesar 1 miliar Yen kepada perempuan mantan *comfort women* yang akan dikelola oleh Pemerintah Korea Selatan; (ii) uang itu akan dikirim bersama dengan permintaan maaf Perdana Menteri Jepang dan penyesalan yang mendalam terhadap masalah ini; (iii) Korea Selatan akan mempertimbangkan permasalahan ini terselesaikan dan tidak akan mengkaji ulang jika Jepang berhasil memenuhi janjinya; (iv) Korea Selatan akan mempertimbangkan menghilangkan patung yang melambangkan *comfort women* yang dibangun oleh aktifis di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang pada 2011; (v) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling mengkritik satu sama lain tentang masalah ini di komunitas internasional (BBC.com, 2015). Hasil dari kesepakatan ini memang tidak sebesar yang diberikan Asia Women Fund. Namun, usaha penyelesaian kali ini lebih dapat diterima oleh pemerintah kedua negara. Jepang telah menyatakan tanggung jawab sebagai korban masa lalu dan mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban; korban telah mengakui upaya rekonsiliasi korban; dan korban kini telah mengambil sikap untuk bekerja sama dalam kebijakan rekonsiliasi (Kumagai, 2016).

Meskipun kesepakatan telah terlaksana, tidak begitu saja dapat dikatakan mengakhiri permasalahan. Jepang tidak akan mencairkan dana bantuan jika Korea Selatan tidak membongkar patung *comfort women* yang ada di depan Kedutaan Besar Jepang. Akan tetapi pihak Korea Selatan menjelaskan jika aktifis yang mendirikan patung tersebut menolak membongkarnya dan justru akan membuat patung lain di wilayah Korea Selatan dan di luar wilayah Korea Selatan (The Japan Times, 2015). Setidaknya sebagian Kesepakatan 2015 telah dilaksanakan. Sekitar setengah dari 1 miliar yen (hampir \$ 9 juta) dari Tokyo telah dihabiskan, termasuk pembayaran kepada 34 dari 47 *comfort women* yang masih hidup (Arrington, 2018). Kompensasi akan diberikan kepada mantan *comfort woman* yang masih hidup dan keluarga yang telah ditinggalkan melalui yayasan The Reconciliation and Healing Foundation. Semenjak mulai berjalan pada Juli 2016, yayasan ini telah menyalurkan dana sebesar 4,4 miliar won kepada 34 orang yang selamat dan 58 keluarga yang telah meninggal dunia (Kang, 2018). Persoalan patung *comfort women* seolah olah tidak ditanggapi oleh Pemerintah Korea Selatan. Patung semacam itu justru kembali dibangun di depan kantor Konsulat Jenderal milik Jepang di Busan dan wilayah Asia lainnya (Panda, 2017).

Pada bab 2.2 telah dijelaskan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*. Pemerintah Korea Selatan terus meminta permintaan maaf resmi dan pertanggungjawaban Jepang untuk korban serta menghukum para pelaku. Beberapa pejabat Jepang juga telah memberikan permintaan maaf dan memberikan kompensasi. Permintaan maaf tidak begitu saja diterima oleh

Korea Selatan sampai pada akhirnya ditandatangani Kesepakatan 2015. Meski begitu, isu ini tetap masih menjadi hambatan bagi membaiknya hubungan kedua negara. Hubungan buruk antara kedua negara sudah terjadi sejak lama dan permasalahan *comfort women* bukanlah satu-satunya permasalahan yang menjadi hambatan. Untuk itu pada bab selanjutnya penulis membahas mengenai hubungan antara Korea Selatan dan Jepang serta konflik yang dihadapi keduanya.

### **2.3 Dinamika Hubungan Korea Selatan dan Jepang**

Keputusan yang diambil oleh Park Geun Hye tidak lepas dari dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Dinamika hubungan yang fluktuatif antara kedua negara telah lama berlangsung yaitu sejak masa penjajahan. Secara resmi Korea menjadi koloni Jepang pada 1920 setelah adanya Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Selama masa penjajahan Jepang, masyarakat Korea terjebak dalam kemiskinan dan terintimidasi. Berbagai perlakuan pemerintahan kolonial Jepang terhadap Korea Selatan yang menyakitkan meninggalkan jejak kebencian terhadap Jepang di antara masyarakat Korea secara turun temurun.

Setelah Korea Selatan merdeka pada tahun 1945, Korea Selatan dan Jepang memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik. Pada 1951, Korea Selatan dan Jepang mulai melakukan negosiasi tentang permasalahan selama Jepang menguasai Korea. Normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dimulai setelah ditandatanganinya perjanjian kesepakatan damai Jepang – Korea Selatan pada tahun 1965 (Kyong-bok, 2005). Kedua negara mempertahankan keadaan damai mereka karena pada era 1980-an Jepang dan

Korea Selatan berpegang teguh pada kebijakan luar negeri berdasarkan ketergantungan yang berkelanjutan pada aliansi bilateral mereka dengan AS dan bahaya yang terus-menerus dari musuh-musuh mapan di Asia Timur Laut, yaitu Uni Soviet dan Korea Utara (Rozman & Lee, 2006). Meskipun Jepang dan Korea Selatan bergabung dengan sekutu bersama dan dengan cepat menjadi terintegrasi secara ekonomi, hubungan bilateral tetap bermasalah karena kesenjangan yang lebar tentang bagaimana menangani warisan pemerintahan kolonial Jepang (Cha V. D., 1999).

Korea Selatan dan Jepang kembali merenggang pada 1990 akibat dari konflik historis antara badan-badan pemerintah, dan ledakan emosi dalam media tradisional / sosial dan masyarakat umum (Jonsson, 2015). Saat Presiden Kim Dae Jung (1998-2003) dan Presiden Roh Moo Hyun (2003-2008) menjabat hubungan kedua negara menjadi lebih dekat dari sebelumnya meskipun beberapa ketegangan tetap terjadi. Presiden Kim mencabut larangan lama pada film dan kartun Jepang yang telah dilarang sejak tahun 1945 (Rozman & Lee, 2006). Titik tertinggi diplomasi Kim dengan Jepang adalah dengan datang selama kunjungan Oktober 1998 ke Tokyo (Hundt & Bleiker, 2007). Pada masa Roh kedekatan dua negara ini terlihat saat keduanya sukses menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2002. Masuknya budaya Korea atau "*Korean wave*" juga membantu memperbaiki hubungan karena memikat banyak masyarakat Jepang. Antisipasi telah meningkat bahwa kedua negara dapat mengembangkan fenomena unik ini, muncul dari satu drama TV, menjadi peluang untuk memajukan pertukaran budaya, saling pengertian, dan rekonsiliasi utama mereka (Rozman & Lee, 2006).

Jepang merupakan contoh model ekonomi bagi Korea Selatan. Sebagai contoh, Korea Selatan mengadopsi banyak strategi dasar Jepang untuk pengembangan, dari proses industrialisasi yang dipimpin negara hingga promosi sektor manufaktur yang berorientasi ekspor (Shin, 1994). Namun, selama periode pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2013) ketegangan kembali meningkat. Di bawah pemerintahannya, Korea Selatan dan Jepang sering mengalami kemunduran dalam hubungan sebagai akibat dari permasalahan buku teks sejarah Jepang dan buku putih pertahanan Jepang yang mencirikan pulau-pulau yang disengketakan itu sebagai wilayah Jepang (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan [ROK] 2008; 2009; 2010).

Konflik historis dan sengketa wilayah tetap tidak dapat dihindari oleh Korea Selatan dan Jepang. Permasalahan-permasalahan ini berawal semenjak Kekaisaran Jepang menjajah Korea. Pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun, ia meluncurkan kampanye anti-Jepang setelah Jepang mendeklarasikan Pulau Takeshima/Dokdo sebagai wilayah milik Jepang. Pemerintah Jepang menghiraukan keputusan Korea Selatan dan justru terus mendesak pengakuan internasional atas klaim Jepang atas wilayah yang diperebutkan (Green, 2008). Salah satu perselisihan paling sengit tentang Dokdo meletus pada 2005 ketika pemerintah Prefecture Shimane mengeluarkan peraturan yang menyatakan Hari Takeshima, sebagai isyarat simbolis kepemilikan pulau-pulau oleh Jepang (Kim J. Y., 2014).



Situasi konflik semakin rumit setelah Perdana Menteri Koizumi Junichiro berkunjung ke Kuil Yasukuni<sup>2</sup>. Koizumi telah berulang kali melakukan kunjungan ke kuil ini<sup>3</sup>. Pemerintah di Seoul melihat kunjungan ini sebagai upaya yang sangat publik dan simbolis untuk melegitimasi agresi Jepang sebelum dan selama perang. Korea Selatan, serta korban ambisi kekaisaran Jepang lainnya, dengan demikian menafsirkan kunjungan tersebut sebagai penolakan yang jelas terhadap para pemimpin Jepang saat ini untuk melepaskan diri dari masa lalu negara yang bermasalah (Hundt & Bleiker, 2007). Sebagai bentuk kritik para pemimpin Korea Selatan dan Tiongkok membatalkan KTT mereka dengan Koizumi pada pertemuan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) di Busan.

Tidak hanya *comfort women* yang menjadi permasalahan sejarah bagi Korea Selatan dan Jepang. Perselisihan mengenai buku sejarah pada tahun 2000-2001 memiliki dampak yang sangat signifikan antara Jepang dan negara-negara tetangganya karena perubahan dalam iklim domestik dan internasional setelah Perang Dingin (Kim J. Y., 2014). Menurut Korea Selatan buku yang ada jauh lebih tidak kritis terhadap masa perang Jepang, memberikan informasi yang minim mengenai aneksasi paksa Korea ke dalam kekaisaran Jepang, memberikan pandangan yang menyimpang kepada anak-anak sekolah Jepang dengan pandangan yang terdistorsi dari tindakan perang Korea Selatan, dan menyebut *comfort women sebagai* pelacur profesional yang memilih untuk bekerja di tentara Jepang, yang membayar mereka secara memadai.

---

<sup>2</sup> Kuil Yasukuni merupakan kuil yang dibangun untuk menghormati para penjahat perang yang meninggal dunia, termasuk beberapa politisi dan pemimpin militer yang dieksekusi karena kejahatan perang (Kim J. Y., 2014).

<sup>3</sup> Selama 6 tahun menjabat, Koizumi mengunjungi Kuil Yasukuni setiap tahun (Kim J. Y., 2014).

Akibat dari permasalahan ini Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun, menolak Jepang sebagai kekuatan regional dan menentang peran global Jepang (Hundt & Bleiker, 2007). Ketika pemerintah Jepang menolak untuk menerima tuntutan resmi pemerintah Korea Selatan untuk mengoreksi tambahan pada buku teks "yang sudah disetujui" pada Juli 2001, ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya (Kim J. Y., 2014). Saat itu, Roh Moo Hyun juga menolak melanjutkan pertemuan TCOG terkait dengan Korea Utara dan berupaya menjadikan Jepang sebagai musuh bersama dalam perencanaan pertahanan AS-ROK (Green, 2008). Pemerintah Jepang tidak merasa terancam dan justru berharap hubungan akan kembali membaik setelah masa pemerintahan Presiden Roh berakhir.

Dari penjelasan pada sub bab 2.3 di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Jepang memiliki berbagai hambatan akibat dari permasalahan yang telah terjadi sejak masa penjajahan dan Perang Dunia. Beberapa konflik tidak hanya melibatkan dua negara tersebut tetapi juga negara tetangganya seperti Tiongkok. Kebijakan yang diambil baik oleh Korea Selatan maupun Jepang juga dipengaruhi oleh keberadaan Amerika Serikat. Untuk itu pada sub bab berikutnya perlu dibahas mengenai hubungan antara Korea Selatan-Jepang dengan sekutu dan negara-negara di sekitarnya. Maka pada bab 2.4 penulis membahas mengenai konstelasi politik di Asia Timur dan pengaruh Amerika Serikat.

## 2.4 Konstelasi Politik Regional Asia Timur dan Keberadaan Amerika Serikat

Tiongkok menjadi salah satu kekuatan besar di dunia saat ini. Tiongkok mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi dan juga militer. Kekuatan Tiongkok di Asia termasuk ekonomi yang sedang berkembang; Tiongkok adalah pedagang terkemuka dengan ekonomi regional paling maju, penerima investasi asing terbesar, dan pemegang cadangan devisa terbesar (Sutter, 2008). Organisasi-organisasi multilateral Asia Timur yang ada memilih Tiongkok sebagai anggota utama mereka (Cossa, 2008). Keterlibatan proaktif Tiongkok di Asia telah mengubah hubungan internasional di wilayah ini. Kebangkitan Tiongkok dimaknai oleh negara lain sebagai cara Tiongkok untuk melakukan hegemoni sama seperti kekuatan besar lainnya. Dengan keadaan semacam ini negara-negara di Asia Timur cenderung memilih untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning* dengan Tiongkok (Shambaugh, 2008).

Jepang memilih untuk bersikap lebih tenang dan berfokus pada peningkatan ekonomi. Sedangkan bagi Korea Selatan, Tiongkok merupakan musuh dan juga teman. Tiongkok menjadi musuh bersama bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain terdapat persamaan pendapat antara Korea Selatan dan Tiongkok mengenai berbagai permasalahan. Kedua negara ini sama-sama memiliki permasalahan terkait isu sejarah dan masa perang dengan Jepang. Permasalahan sejarah membuat Tiongkok dan Korea Selatan justru sejalan menjadikan Jepang sebagai musuh. Seoul telah meningkatkan hubungannya dengan Beijing sejak awal 1970-an (Chung, 2009). Selama

tahun 1990-an, tidak seperti Jepang, yang secara resmi mendaftarkan Tiongkok sebagai ancaman potensial, tidak ada jejak kekhawatiran keamanan terhadap Tiongkok yang terlihat jelas di Korea Selatan (Chung, 2006).

Sengketa wilayah juga mewarnai dinamika hubungan ketiga negara. Jepang dan Tiongkok hingga saat ini masih memperebutkan Pulau Senkaku atau Diayoyutai. Korea Selatan juga sedang dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok di wilayah Ieodo/Socotra Rock. Tidak hanya itu, kebangkitan militer Tiongkok juga menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Selatan dan Jepang. Selaku salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia Tiongkok membuat Jepang dan Korea Selatan bergantung pada ekonominya. Pada 2010 ratio ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok mencapai 21% dan ini lebih tinggi dari pada rasio ketergantungan Tiongkok terhadap Korea Selatan (Chung, 2012).

Selain Tiongkok, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang berpengaruh di wilayah Asia Timur. Sebagaimana diukur dengan kemampuan ekonomi dan militer, negara-negara Asia Timur menganggap pengaruh diplomatik dan prestise moral A.S. telah meningkat tajam selama era pasca-Perang Dingin (Shambaugh, 2008). Amerika Serikat dapat berperan penting di wilayah Asia Timur karena pasca Perang Dingin tidak ada kekuatan yang benar-benar menghegemoni di kawasan ini. Demi kepentingan ekonomi di wilayah ini Amerika Serikat ikut andil dalam pembangunan ekonomi melalui perdagangan dan investasi (Sutter, 2008). Amerika Serikat pun menjadi salah satu pasar utama bagi negara-negara di Asia Timur. Krisis nuklir Korea Utara

tidak hanya mejadi ancaman bagi negara tetangga tetapi juga bagi Amerika Serikat.

Jepang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Aliansi yang terbentuk antara Jepang dan Amerika Serikat banyak berkaitan dengan isu keamanan dan ekonomi. Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global dengan menyerahkan sebagian besar kemampuan militernya kepada Amerika Serikat. Aliansi Jepang-Amerika Serikat ini juga untuk mendukung kegiatan Amerika Serikat di wilayah Asia secara lebih luas. Amerika Serikat juga berpengaruh dalam menjaga keamanan di Korea Selatan semenjak ikut andil dalam Perang Korea 1953. Amerika Serikat menempatkan sekitar 37.500 tentara di Korea Selatan (Pan, 2006). Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan juga dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Seperti Kesepakatan Damai Jepang-Korea Selatan 1965 yang berhasil dilaksanakan hanya setelah adanya tekanan dari Amerika Serikat (Hundt & Bleiker, 2007).

Konflik di Semenanjung Korea menjadi salah satu permasalahan utama bagi Asia Timur. Semenjak Perang Dingin hingga saat ini kedua Korea masih terpisah dan bersitegang. Korea Utara memulai program pengembangan nuklir untuk mencegah serangan dari musuh-musuhnya. Adanya krisis nuklir Korea Utara membuat Korea Selatan dan Jepang menjalin kerja sama untuk menghentikan permasalahan ini. Salah satu upaya kerja sama yang ada adalah *Six-Party Talks*. Kerja sama multilateral ini dibentuk karena adanya prospek ketidakstabilan yang berasal dari ketidakmampuan Korea Utara untuk mengintegrasikan diri dengan seperangkat kepentingan kolektif yang lebih

luas dalam mempromosikan stabilitas dan kemakmuran regional (Snyder, 2008).

Terdapat berbagai upaya kerja sama multilateral selain Six-Party Talks untuk menyelesaikan masalah regional Asia Timur. Langkah lain tersebut adalah pembentukan Four-Party Talks (dua Korea, Amerika Serikat, dan China), meskipun Korea Utara awalnya enggan untuk bergabung. Four-Party Talks lebih banyak mempromosikan kerja sama Tiongkok dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan daripada untuk mengatasi masalah yang melibatkan Korea Utara.

Dari penjelasan pada sub bab 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan hubungan Korea Selatan-Jepang, dinamika politik di Asia Timur juga fluktuatif. Terdapat dua negara yang cukup mendominasi jika kita membahas Asia Timur yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat yang juga menjadi dua kekuatan besar saat ini. Permasalahan yang dihadapi negara Asia Timur pun sering kali berkaitan satu sama lain terutama mengenai sengketa wilayah dan juga permasalahan sejarah. Namun, dapat dilihat jika permasalahan utama di Asia Timur berkaitan dengan Tiongkok dan Korea Utara. Tidak dapat dipungkiri kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara Asia Timur dipengaruhi oleh keadaan di wilayah regionalnya. Dalam bab selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana negara-negara yang berada di wilayah Asia Timur mempengaruhi Korea Selatan dalam pengambilan keputusan terkait dengan isu *comfort women*.